

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)



KECAMATAN DOIGAR
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat tersusun sesuai jadwal.

Laporan ini disusun dengan mendasar pada Renstra Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025-2029 dan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Bupati Bolaang Mongondow atas amanah yang telah diberikan dalam urusan wajib di bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan. Isi laporan ini menunjukkan gambaran sejauh mana Kinerja Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

Meskipun segala upaya telah dilakukan namun laporan ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu masukkan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai upaya kami menuju kesempurnaan LKIP ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 kami sampaikan untuk diperiksa. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya laporan ini, semoga dapat memberikan manfaat, amin.

Poigar, Februari 2026



CAMAT POIGAR

DAENDELS SOMBOADILE, SE. M. Si
PENATA TINGKAT I
NIP : 19750807 201001 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN POIGAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
- C. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN POIGAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. PERENCANAAN STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
- C. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- D. RENCANA KINERJA TAHUNAN
- E. INDIKATOR TUJUAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - 1. PENGUKURAN KINERJA
 - 1. Metode Pengukuran Kinerja
 - 2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
 - 2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN
 - 3. PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
- B. REALISASI ANGGARAN
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD
 - 2. Anggaran dan Realisasi Perkegiatan
 - 3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang ditetapkan

BAB IV PENUTUPAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

LAMPIRAN II Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN POIGAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow. Kecamatan merupakan Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Poigar berada di Desa Tiberias yang dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Merumuskan rencana, program dan kegiatan anggaran Kecamatan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
2. Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu,
3. Pembinaan pemerintah Kelurahan,
4. Pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban wilayah,
5. Pembinaan kesejahteraan masyarakat.

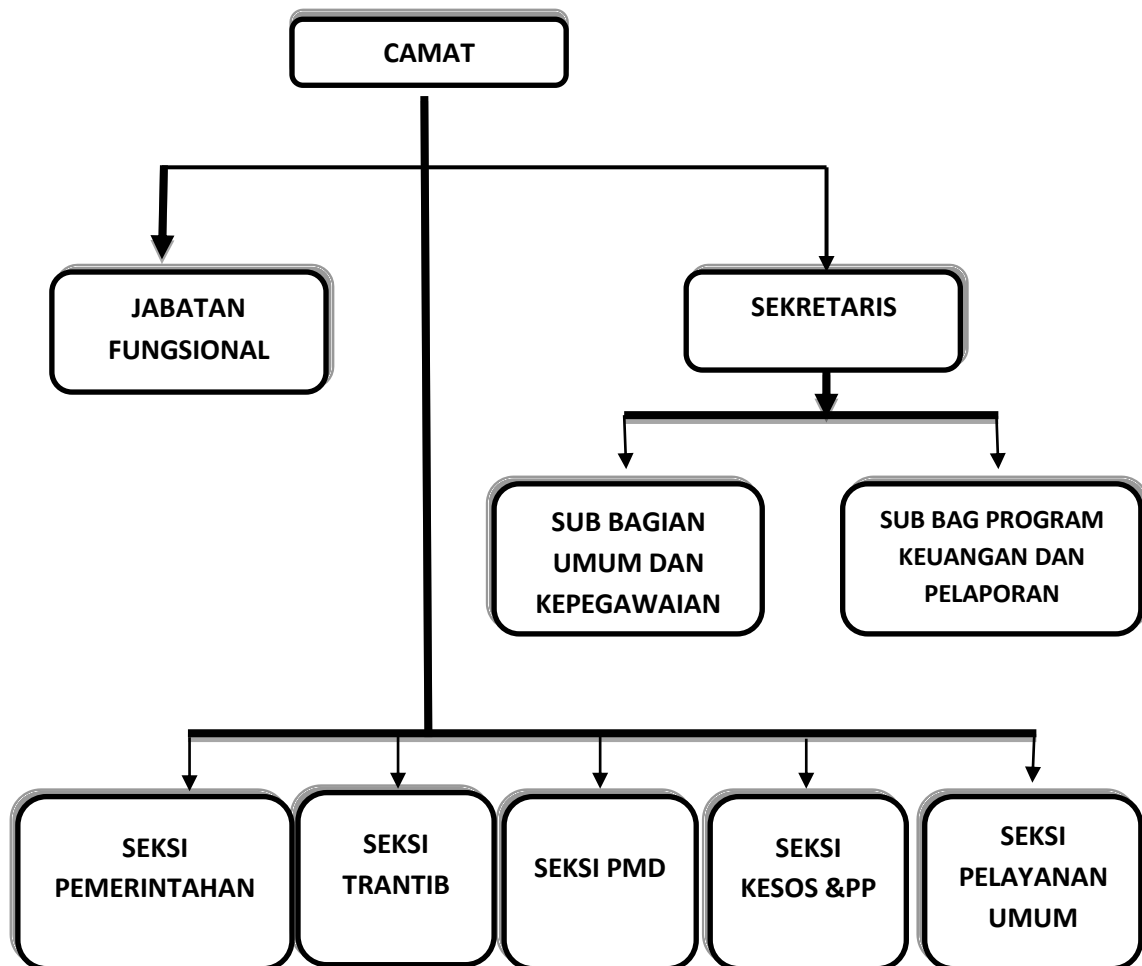
Dalam melaksanakan tugas, Camat dibantu oleh :

- a. Sekretaris Kecamatan,
- b. Seksi Pemerintahan,
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan,
- f. Seksi Pelayanan Umum.

Dalam melaksanakan tugas operasional pelayanan Administrasi Kecamatan, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Struktur Organisasi Kantor Camat Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Camat | Eselon III/a |
| • Sekretaris Camat | Eselon III/b |
| • Kepala Seksi Pelayanan Umum | Eselon IV/a |
| • Kepala Seksi Pemerintahan | Eselon IV/a |
| • Kepala Seksi PMD | Eselon IV/a |
| • Kepala Seksi Kesos dan PP | Eselon IV/a |
| • Kepala Seksi Trantib | Eselon IV/a |

- Kasubag Umum dan Kepegawaian Eselon IV/b
- Kasubag Program, Keuangan & Pelaporan Eselon IV/b

Kantor Camat Poigar mempunyai personil sebanyak 18 orang termasuk Sekdes PNS, yang terdiri dari :

- Kecamatan : 18 Orang
- Sekdes : - Orang
- Sangadi : 2 Orang
- THL : 2 Orang

Golongan IV/a	= 2 Orang
Golongan IV/b	= - Orang
Golongan III/d	= 4 Orang
Golongan III/c	= 3 Orang
Golongan III/b	= 2 Orang
Golongan III/a	= 1 Orang
Golongan II/d	= 2 Orang
Golongan II/c	= 4 Orang
Golongan II/b	= 1 Orang
Golongan II/a	= - Orang
Golongan I/c	= - Orang

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan Poigar sangat penting keberadaannya untuk masyarakat, hal ini disebabkan karena Kondisi dan potensi yang ada di Kecamatan Poigar merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Lingkungan Strategi Kecamatan Poigar adalah sebagai berikut :

a. Geografis

Kecamatan Poigar merupakan salah satu Bagian Wilayah Utara di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Poigar hasil dari pemekaran dari Kecamatan Bolaang dengan ibu kota Kecamatan Desa Tiberias memiliki luas wilayah 258,16 km² yang terdiridari 20 desa,91 dusun dengan jumlah penduduk 18.100 jiwa. Batas geografis kecamatan Poigar sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kec. Sinonsayang Kab. Minsel
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Bilalang
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kec. Bolaang Timur

Desa Tiberias yang menjadi Ibu kota dari Kecamatan Poigar dapat diakses dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado) dengan waktu tempuh ± 4 Jam 46 mnt dan berjarak 199,8 Km. Sementara bila di akses dari ibu Kota kabupaten hanya berjarak 51 Km dengan waktu tempuh kurang dari 1 Jam.

Topografi Kecamatan Poigar beragam mulai dari dataran landai dan bergelombang dengan ketinggian tempat 3 m dpl (meter diatas permukaan laut) yang diukur dari ibu kota kecamatan.

b. Kependudukan

Keadaan penduduk di Kecamatan Poigar pada tahun 2025 sebanyak 18.100 jiwa. Desa dengan Jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Wineru yaitu se-banyak 2.116 jiwa.

Sex ratio secara umum diatas keadaan tahun 2025 sebesar 107 persen dan jika dilihat sex ratio per desa maka, semua desa yang ada diatas 100 yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

c. Sosial Politik

Perubahan peta politik Nasional telah membawahkan dampak terbukanya Demokrasi dan kebebasan bagi rakyat. Berkembangnya tuntutan dinamika dan aspirasi masyarakat saat ini adalah merupakan pemicu untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas Pemerintahan yang baik yaitu dengan memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya dan dapat semudah mungkin dijangkau masyarakat.

Perubahan lingkungan seperti diuraikan diatas, menuntut manajemen organisasi Kecamatan Poigar mengubah logika yang dipakai sebagai dasar menjalankan roda organisasinya. Pengetahuan manajemen berkembang melalui proses pergeseran paradigma yaitu manajemen tradisional, bergeser kepada paradigma baru sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

d. Industri dan Perdagangan

Aktivitas perdagangan di pasar berada di Desa Poigar II ini merupakan pasar yang sudah cukup lama di kecamatan ini. Sedangkan tempat perdagangan berupa warung dan Kios ada sebanyak 290 unit yang tersebar pada semua Desa yang ada. Desa dengan jumlah warung terbanyak ada di Desa Poigar II.

C. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN POIGAR

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Poigar menghadapi beberapa permasalahan yang merupakan isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Kualitas sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Belum maksimalnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah berupa aset dan tor penunjang kinerja kecamatan dan desa.
3. Masih lemahnya koordinasi antar stakeholders di tingkat kecamatan.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Poigar dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan

- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.
- Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- Belum maksimalnya kegiatan pembinaan kepada masyarakat terkait keamanan dan ketertiban
- Kurangnya keteladanan dan ketokohan di dalam masyarakat
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan

- Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penggulangan Kemiskinan di kecamatan.
- Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow, maka visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 adalah:

“Bolaang Mongondow Yang Baru, Berbudaya, Berdaya Saing dan Mandiri sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur”

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 tersebut dirumuskan melalui 5 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdayasaing.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumber daya lokal.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokrasi dan Bebas KKN.
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia bagian Timur.

Kecamatan Poigar sesuai tugas dan fungsinya mendukung dua misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokrasi dan Bebas KKN.

Dan mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu :

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

2. Visi dan Misi Kecamatan Poigar

Untuk mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow maka Kecamatan Poigar menetapkan :
Visi :

“Bolaang Mongondow Yang Baru, Berbudaya, Berdayasaing dan Mandiri sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur”

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kecamatan Poigar menetapkan misi sebagai berikut :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokrasi dan Bebas KKN.

B. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Poigar

Tujuan:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Poigar

Sasaran:

Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Poigar

No.	Tujuan	Indikator kinerja Tujuan	Kondisi Awal Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke.			
						2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang berkualitas	Nilai Rata Rata Capaian Opini BPK, Nilai SAKIP, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	71,01			77,5	83,5	84,75	87,75
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah	57,09			75	75	90	95
			58,6	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	63	70	73	78

C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut komitmen Kecamatan Poigar untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Poigar tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Kecamatan Poigar tahun 2025:

Revisi Perjanjian Kinerja Kecamatan Poigar Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	73	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.941.332.156
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 15.103.770

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kecamatan Poigar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poigar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai Predikat SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Hasil Penelitian oleh KemenPAN dan RB	73

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka yaitu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. RKT TA. 2025 ini juga merupakan gambaran kegiatan dan output Kecamatan Poigar yang dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2025. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Kecamatan Poigar dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai Predikat SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	73

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh manapencapaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persenta seperbandingan realisasi dengan antara target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Kecamatan Poigar, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kiner jadi lakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85 = Sangat berhasil

$70 < X \leq 85$ = Berhasil

$55 < X \leq 70$ = Cukup Berhasil

≤ 55 = Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

	Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai <i>mean</i> setiap kategori
Capaian Sasaran=	
	Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

SangatBerhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

CukupBerhasil : 62,5

TidakBerhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil**, **berhasil**, **cukup berhasil**, dan **tidak berhasil**.

2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Poigar terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran di ketahui bahwa tujuan dari Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan social kemasyarakatan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan public Kecamatan Poigar dengan sasaran meningkatkan Tata Kelolah Pemerintahan melalui peningkatan system Akuntabilitas Pemerintah. Uraian dan Analisis Capaian Kinerja masing-masing sasaran Kecamatan Poigar adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan”

Pengukuran tingkat capaian sasaran “Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan” dengan indicator sasaran “Nilai Predikat SAKIP Organisasi Perangkat Daerah” dilakukan melalui penilaian menyeluruh dari peningkatan kinerja Pemerintahan Kecamatan. SAKIP merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan dan peningkatan Tata Kelolah Pemerintahan sehingga peningkatan kinerja sangat berhubungan dengan tingkat pelayanan public dari suatu instansi khususnya menyangkut urusan kewilayahan (kecamatan). Dalam penghitungan nilai SAKIP didasarkan pada penilaian yang dilaksanakan oleh tim evaluator SAKIP pemerintah yang dilakukan oleh inspektorat daerah. Sehingga untuk penentuan formula didasarkan dari Nilai LHE time vakuator.

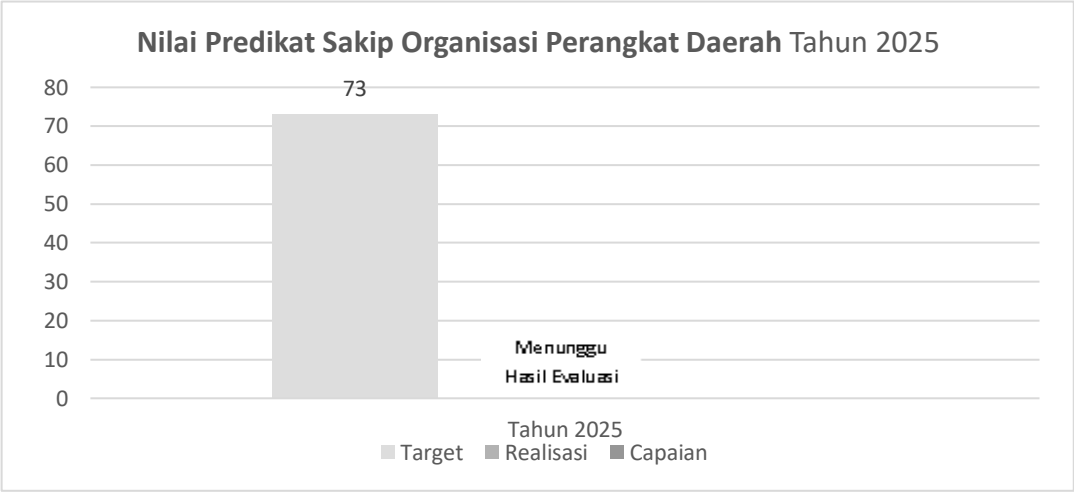
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Poigar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Predikat SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	73	Dalam tahap Penyusunan	0

Berdasarkan tabel diatas, Nilai Sakip Kecamatan Poigar Tahun 2025 belum bisa diukur, sehingga capaian Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Poigar pada Tahun 2025 belum dapat disimpulkan pencapaiannya



2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024

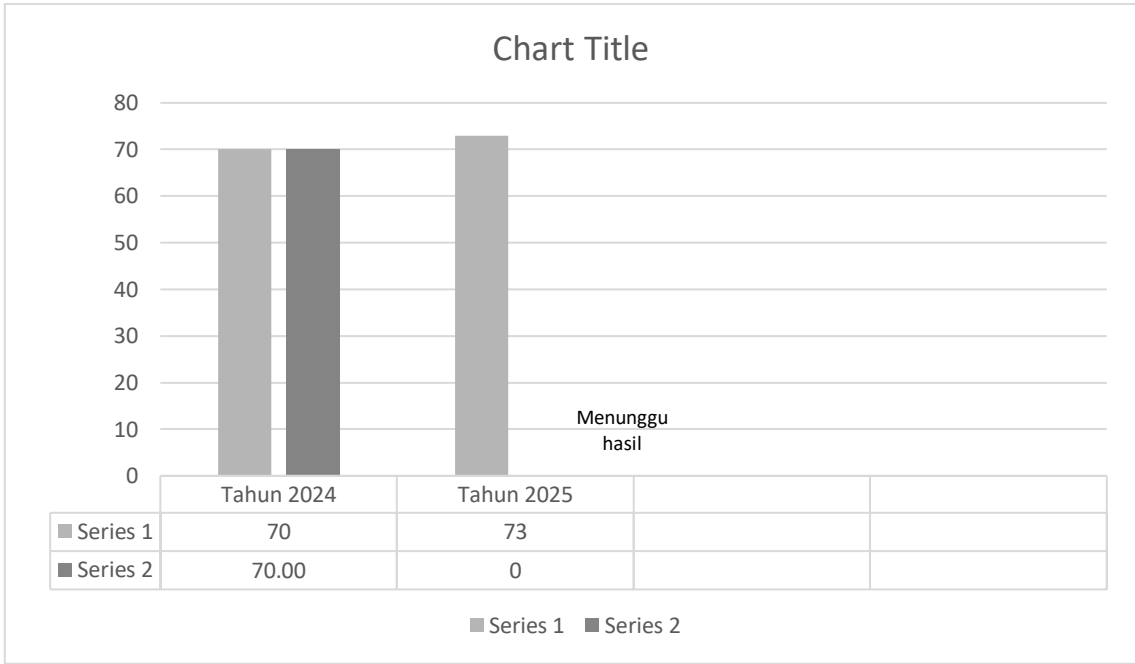
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Poigar pada tahun 2025 dibandingnagnkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2024) dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Poigar Tahun 2024 - 2025

No	INDIKATOR	2024			2025			TARGET AKHIR RENSTRA
		TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)	
1	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	70	70,00	100	73	Menunggu Hasil Evaluasi	0	78

Nilai Sakip Kecamatan Poigar Tahun 2025 belum bisa diukur, sehingga capaian Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Poigar pada Tahun 2025 belum dapat disimpulkan pencapaiannya.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Poigar memperoleh Nilai 70,00 atau Predikat **B** mencapai target.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat pada Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja **Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah** Tahun 2023-2026 berdasarkan Target Akhir Renstra secara rinci dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Nilai Predikat SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	78,81	75,87	70,00	Menunggu Hasil	78

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah dan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada peraturan menteri tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

- Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Kecamatan Poigar masih dalam tahap Penyusunan.
- Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Kecamatan Poigar berhasil meraih Nilai 70,00 dengan predikat “B”.
- Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Kecamatan Poigar berhasil meraih Nilai 75,87 Dengan Predikat “BB”

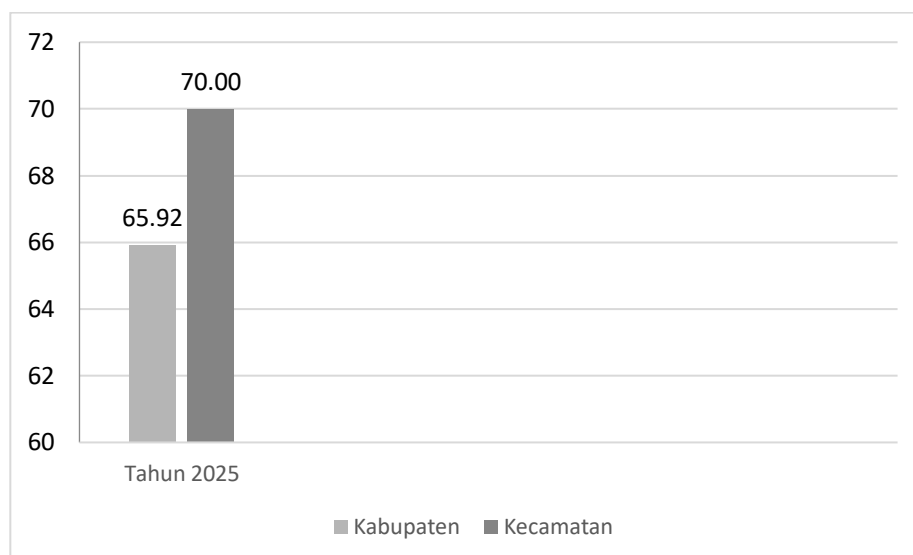


4. Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional (Jika ada)

Adapun perbandingan Capaian dengan standart Nasional yang ada dapat kita lihat pada tabel berikut :

Instansi	Nilai
Kabupaten	65,92
Kecamatan	70,00

Berdasarkan tabel diatas sesuai hasil evaluasi KemenPAN tahun 2023 Kabupaten memperoleh nilai 65,92 dan Kecamatan sesuai evaluasi Inspektorat Daerah Tahun 2024 memperoleh nilai 70,00 data tersebut dapat di lihat pada Grafik berikut ini :



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Hasil Evaluasi mengacu pada tahun sebelumnya menunjukkan perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2024	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,89
2	Pengukuran Kinerja	30	18,78
3	Pelaporan Kinerja	15	11,33
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,00
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Rekomendasi :

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam hasil evaluasi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langka-langka untuk perbaikan sebagai berikut:

a. Komponen Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- Menyampaikan dokumen crosscutting Perangkat Daerah;

- Melaksanakan rapat pembahasan terkait perumusan dan penyusunan perencanaan kinerja Internal Perangkat Daerah;
- Melaksanakan pemantauan berkala atas Rencana Aksi dalam rangka perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang lebih baik;
- Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
- Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;

b. Komponen Evaluasi atas pengukuran Kinerja

- Menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Pengukuran data Kinerja dan pedoman teknis pengumpulan data kinerja internal perangkat daerah baik berupa SK dan/atau SOP;
- Melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit secara berkala sampai sampai pada level bawah secara berjenjang sebagai dasar penyesuaian strategis, kebijakan dan anggaran dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- Menyusun dokumen Laporan Kinerja secara berkala (triwulan/semester);
- Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja pada website Perangkat Daerah;
- Melaksanakan Rapat Internal Perangkat Daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dan digunakan sebagai dasar penyesuaian aktifitas dan anggaran dalam mencapai target kinerja perangkat daerah ditahun berikutnya.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada perangkat daerah secara berjenjang;
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah;
- Melaksanakan rapat internal perangkat daerah pembahasan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	Dalam Proses Penyusunan	94,00%	-

Target Efisiensi Pada Indikator Capaian Kinerja dalam proses penyusunan dan capaian Realisasi Anggaran Sebesar 94,00%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- II. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poigar pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Poigar memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanjadari DPPA-SKPD Kecamatan Poigar pada tahunanggaran 2025 adalah sebesarRp 1.956.435.926,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.839.141.345,00 atau 94,00%, sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.024.296.984,00 atau 95,14%. Belanja operasi yang dikelola Kecamatan Poigar pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.1.949.220.926,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp.1.831.953.345,00 atau 93,98%. Belanja modal yang dikelola Kecamatan Poigar pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.7.215.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp.7.188.000,00 atau 99,62%.

Untuk lebih jelasnya besar anggaran dan realisasi APBD Kecamatan Poigar pada Tahun Anggaran 2024 dan perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kantor Kecamatan Poigar Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	URAIAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
1	Belanja Pegawai	1.868.421.773	1.793.247.871	95,98	1.728.458.569	1.635.699.391	94,63
2	Balanja Barang & Jasa	259.357.106	231.049.113	89,08	220.762.357	196.253.954	88,89
Jumlah		2.127.778.878	2.024.296.984	95,14	1.949.220.926	1.831.953.345	93,98

2. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian kinerja realisasi anggaran program / kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.941.332.156	1.824.906.345	94,00
• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.749.809.605	1.654.339.494	94,54
-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.719.458.569	1.628.449.391	94,71
-Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	26.860.662	24.300.728	90,46
-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	3.487.374	1.589.375	45,57
• Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.778.439	93.053.361	99,22
-Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	13.103.439	12.494.361	95,35
-Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.425.000	4.395.000	99,32
-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.250.000	76.164.000	99,88
• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.999.304	54.233.726	84,74
-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.999.304	3.233.726	24,87
-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.000.000	51.000.000	100
• PemeliharaanBarangMilik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	33.744.808	23.279.764	68,98
-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas nJabatan	31.744.808	21.281.764	68,98
-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	1.998.000	99,9
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
• Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.103.770	14.235.000	92,24
-Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.103.770	14.235.000	92,24

3. Hambatan Dan Kendala dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

I) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrsi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian target kinerja keuangan sebesar 94,54%, tidak ada permasalahan karena kebutuhan sesuai dengan yang dianggarkan

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian target kinerja keuangan sebesar 99,22%, tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian target kinerja keuangan sebesar 84,74% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai dengan kebutuhan. Dan solusi sebaiknya ditahun yang akan datang disesuaikan dengan jumlah yang dibayarkan setiap bulannya.

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Capaian target kinerja keuangan sebesar 68,98% tidak ada permasalahan karena penyerapan anggaran direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

II. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

1) Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian target kinerja keuangan sebesar 94,24%, tidak ada permasalahan karna penyerapan anggaran direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maupun di dalam RENSTRA Kecamatan Poigar 2023-2026 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

A. KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan capaian kinerja organisasi sebagaimana uraian pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sasaran Kecamatan Poigar pada tahun 2025 pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan masih menunggu hasil, Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja Kecamatan Poigar pada tahun 2025 adalah mencapai 94,00%.

Berbagai pelaksanaan program yang dilakukan pada TA. 2025 ini merupakan hasil dari penyusunan program yang telah melibatkan berbagai stakeholders. Penyusunan program dan pelaksanaannya tetap berada pada alur dan koridor perencanaan strategis Kecamatan Poigar 2023 – 2026 sehingga semua kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun 2025 tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Poigar tahun 2023-2026.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berada dalam organisasi pemerintah kabupaten, maka program-program yang dilakukan tetap dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dan diarahkan sebagai media dan sarana untuk mendukung Visi dan Misi serta Rencana Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Poigar pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2023 s.d 2026.
2. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Pemerintah Kecamatan Poigar dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Mengkoordinasikan rencana program dengan Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah tentang skala prioritas program kegiatan sesuai dengan Rencana kerja pembangunan daerah (RPDKabupatenBolaangMongondow) denganPemerintahKecamatan poigar yang mengacu kepada tahapan pelaksanaan Renstra tahun 2023- 2026.
4. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi.



CAMAT POIGAR

DAENDELS SOMBOADILE, SE.M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP : 19750807 201001 1 006